

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Faisal, Moch Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Hanitijo, Ronny Soemitro, *Metodologi dan Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Nawawi, Barda Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Soetedjo, Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak*. Cetakan IV. (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Wiyono, R. dan Tarmizi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jurnal

- Afriado, Mahrizal., “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. JOM Fakultas Hukum”, Volume III. Nomor 2, 2016.
- Mukhils, R., “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume III Nomor 1, 2010.
- Nurrohman, Bayu., “Optimalisasi pelayanan E-KTP guna meningkatkan data kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan daerah”, Volume 10, Nomor 6, 2017.
- Pratama, N. R., “Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak”. Aktualita, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 tahun 1987

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.-PK.10 Tahun 1998

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS6.PK.01.05.02-573 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas.

Internet

Anak. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 1 November 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 1 November 2022.

Optimalisasi. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 2 Januari 2023, dari

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/optimalisasi>.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Miranti Nilasari, A.Md.I.P., S.Sos. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta, pada 2 November 2022 pada Rabu, 2 November 2022 bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

Wawancara dengan Priyo Wibowo, S.Psi. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta, pada Rabu, 2 November 2022 bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

Wawancara dengan Suprpto, S.Psi. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta, pada Rabu, 2 November 2022 bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.